

## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana HR Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI Yang Telah Habis Masa Berlakunya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian”, membahas masalah apakah HR yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan olahan bersertifikat-SNI yang telah habis masa berlakunya dapat dipertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep diperoleh kesimpulan: Adanya perbuatan melawan Hukum (perbuatan pidana), yakni melanggar Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2014 yakni memproduksi dan memperdagangkan AMDK merupakan pangan olahan, tidak memiliki sertifikat SNI karena telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dengan sengaja tetap memproduksi atau memperdagangkannya, tidak sesuai dengan standar mutu.

Pelaku melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan yakni UU No. 20 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, HR lebih tepat didakwa dan diputus atas dasar telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2014. Terjadi perbarengan tindak pidana dengan pidana lebih berat melanggar ketentuan Pasal 142 UUNo.18 Tahun 2012. Tindakan HR memenuhi 4 (empat) unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci: HR, Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Olahan, SNI Yang Telah Habis Masa Berlakunya.

## ABSTRAK

The study entitled “Criminal Liability of HR who produced and distributed Processed Food with SNI certificate which was already expired in View of Law Number 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment” discussed the problem whether HR who produced and distributed Processed food with SNI certificate which was already expired in View of Law Number 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment. This study used a legislation and concept approach, and concluded that there was an action against the law (a crime), which was a violation of Article 65 of Law Number 20 of 2014 concerning producing and distributing AMDK in the from of pcessed food which did not have SNI certificate because it had been expired and had not been renewed. HR also intentionally produced and distributed th products not in accordance with quality standards. The perpetrator had violated two regulations namely Law Number 20 of 2014 and Law Number 8 of 1999 in relation with the provisions of Article 64 paragraf (1) of the Criminal Code. HR was more appropriately sentenced for committing a criminal act against the provisions of Article 142 of Law Number 18 of 2012. HR actions had fulfilled 4 (four) elements of criminal liability namely, an action against the law (criminal act), ability to take responsibility, a from and no legal excuse.

Keywords: Produce and Distribute Processed Food, Expired SNI